

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Julio Rikky S Pasaribu¹, Naila Ananda Runi², Rachel Meylani Situmorang³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email Korespondensi: anandaruninaila@gmail.com

Email: juliopasaribu28@gmail.com; rachelmey54@gmail.com;

putrikemaladewilubis.unimed@gmail.com; alawiyah@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) on the economic growth of districts/cities in North Sumatra Province during the period 2021–2024. Using a quantitative approach and panel data regression analysis on 33 districts/cities, this study, thru the Chow Test and Hausman Test, establishes the Fixed Effect Model as the best estimation model. The research findings indicate that DAU and DAK do not significantly affect economic growth, suggesting that these two types of transfers have not been optimally utilized for productive spending capable of boosting regional GRDP. Conversely, DBH was found to have a positive and significant impact, indicating that this fund is more effective in strengthening fiscal capacity and local economic activity. Simultaneously, these three fiscal variables significantly influence economic growth with an Adjusted R-squared value of 98.38 percent, confirming that central government fiscal transfers play a strategic role in the dynamics of regional economic development, although their effectiveness is highly dependent on local government governance and spending orientation.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2021–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel terhadap 33 kabupaten/kota, penelitian ini melalui Uji Chow dan Uji Hausman menetapkan Fixed Effect Model sebagai model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa kedua jenis transfer tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk belanja produktif yang mampu mendorong peningkatan PDRB daerah. Sebaliknya, DBH terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa dana ini lebih efektif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan aktivitas ekonomi lokal. Secara simultan, ketiga variabel fiskal tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 98,38 persen, sehingga menegaskan bahwa transfer fiskal pemerintah pusat memainkan peran strategis dalam dinamika pembangunan ekonomi regional, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola dan orientasi belanja pemerintah daerah.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan tolok ukur utama keberhasilan pembangunan suatu daerah karena menggambarkan kemampuan wilayah tersebut dalam memperbesar produksi barang dan jasa secara berkesinambungan (Todaro & Smith, 2020). Pada level kabupaten/kota, laju pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan publik serta bagaimana pemerintah daerah merancang dan menjalankan kebijakan fiskal. Salah satu komponen penting dalam kebijakan fiskal adalah mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat, yang antara lain berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengatur sisi penerimaan dan belanja pemerintah sehingga aktivitas ekonomi dapat terdorong dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Musgrave, 1959).

Penyaluran dana dari pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antarwilayah sekaligus memperkuat AU dirancang sebagai dana yang membantu menyetarakan kapasitas anggaran, DAK diprioritaskan untuk membiayai program tertentu yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, sedangkan DBH didistribusikan berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara (Halim, 2004). Sejak kebijakan otonomi daerah mulai berlaku pada tahun 2001, nilai transfer yang dialirkan melalui APBN terus mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2009). Besarnya dana yang diterima dan cara penggunaannya diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui peningkatan belanja modal dan kinerja pelayanan publik (Bahl & Bird, 2018).

Fakta di Sumatera Utara menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat Kota Medan sebagai daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi, mencapai Rp242,3 triliun dan pertumbuhan 5,19%, sementara Kabupaten Nias hanya Rp9,1 triliun. Ketidakseimbangan yang serupa juga ditemukan antara Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal, serta antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Meski transfer dana dari pusat telah diberikan, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi daerah belum merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan seputar efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana transfer dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Dalam literatur ekonomi publik, keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang banyak dikaji. Pendelegasian kewenangan penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diyakini dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya (Musgrave, 1959; Oates, 1972, 1999). Transfer dana berfungsi sebagai sumber daya bagi pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan optimal.

Teori pertumbuhan endogen (Romer, 1986; Lucas, 1988) menekankan bahwa investasi pemerintah, termasuk dana transfer, dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat memberikan efek berantai yang menunjang pertumbuhan berkelanjutan (Barro, 1990). Karena itu, dana transfer sebaiknya difokuskan untuk belanja modal produktif seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memperbesar kapasitas produksi serta daya saing daerah (Akai & Sakata, 2002).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara transfer fiskal dan pertumbuhan ekonomi belum konsisten. Studi di Jawa Timur (2010–2012) menunjukkan PAD, DAU, dan DBH berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun DAK justru berdampak negatif (Prakosa, 2004; Sulaeman & Silvia, 2019). Di Sumatera Utara, penelitian tahun 2005–2008 dan 2017–2019 menemukan DAU dan DBH berpengaruh positif, sedangkan DAK tidak menunjukkan efek baik (Syahputra, 2010; Nasution & Siregar, 2020). Perbedaan hasil ini menimbulkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap efektivitas masing-masing dana transfer.

Efektivitas DAK sebagai dana khusus masih diperdebatkan, karena banyak penelitian belum

membuktikan pengaruh positifnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. DBH relatif lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga pemerintah daerah leluasa mengalokasikannya ke berbagai jenis belanja (Megasari & Wahidahwati, 2022). Namun, pemanfaatan dana transfer harus tetap efisien dan tepat sasaran agar dapat memberikan dampak maksimal pada pertumbuhan ekonomi daerah (Siswajanthi et al., 2024; Elhsan et al., 2023).

Melihat adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan perubahan kebijakan transfer fiskal pasca-pandemi COVID-19 melalui UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, analisis tentang efektivitas dana transfer menjadi semakin penting. Penelitian ini menggunakan data terbaru periode 2021–2024 agar dapat memberikan gambaran aktual terkait pemulihan ekonomi daerah. Sumatera Utara dipilih sebagai objek studi karena memiliki keragaman ekonomi antardaerah, mulai dari kota besar hingga kabupaten dengan basis ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini memberi peluang analisis yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dana transfer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2021–2024, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan agar distribusi dan penggunaan dana transfer dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan fiskal, serta memperkuat peran desentralisasi fiskal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, karena bertujuan menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang dianalisis berupa data sekunder berbentuk data panel kabupaten/kota selama periode 2021–2024 yang disusun dari publikasi Badan Pusat Statistik dan dokumen resmi Kementerian Keuangan.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa: (1) data pertumbuhan ekonomi atau PDRB riil kabupaten/kota sebagai variabel dependen, dan (2) data realisasi DAU, DAK, dan DBH sebagai variabel independen. Seluruh data diperoleh melalui publikasi statistik pemerintah, laporan realisasi APBD, serta basis data resmi lainnya yang relevan.

Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sampel ditentukan dengan teknik sensus, yaitu menyertakan semua kabupaten/kota yang memiliki data lengkap selama periode pengamatan. Dengan demikian, unit analisis penelitian adalah kabupaten/kota, sedangkan unit waktu adalah tahun.

PEMBAHASAN

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	81.630393	(32,96)	0.0000
Cross-section Chi-square	440.837914	32	0.0000

Hasil Uji Chow dengan nilai probabilitas 0,0000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling tepat digunakan dibandingkan model Common Effect dalam analisis data panel. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik masing-masing unit cross-section (kabupaten/kota) bersifat signifikan dan tidak boleh diabaikan dalam pemodelan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Secara fungsi, Uji Chow digunakan untuk menguji apakah model yang mengakomodasi efek individual (Fixed Effect) memberikan peningkatan kecocokan yang signifikan dibandingkan model yang menganggap semua unit sama (Common Effect). Dengan demikian, keputusan menggunakan model Fixed Effect memastikan bahwa analisis lebih sesuai dengan struktur data yang memiliki heterogenitas antar daerah.

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	64.891763	3	0.0000

Hasil Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, lebih kecil daripada batas signifikansi 0,05, sehingga model Fixed Effect dinilai lebih tepat digunakan daripada model Random Effect dalam penelitian ini. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota yang berkorelasi dengan variabel penjelas, sehingga asumsi dasar yang diperlukan pada model Random Effect tidak terpenuhi.

Berdasarkan aturan pengambilan keputusan, nilai probabilitas Uji Hausman yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa Random Effect adalah model yang sesuai, dan menerima hipotesis alternatif bahwa Fixed Effect memberikan estimasi yang lebih konsisten. Dengan kata lain, penggunaan Fixed Effect Model (FEM) dianggap lebih mampu menggambarkan variasi antar unit dalam data panel dan menghasilkan estimasi parameter yang lebih reliabel.

Hasil Regresi Data Panel dengan Model FEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 11/17/25 Time: 21:33
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.65E+13	4.21E+12	6.305738	0.0000
X1	-1.003379	4.956939	-0.202419	0.8400
X2	-4.796545	23.12984	-0.207375	0.8362
X3	123.6434	42.79939	2.888906	0.0048

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988192	Mean dependent var	3.08E+13
Adjusted R-squared	0.983887	S.D. dependent var	5.30E+13
S.E. of regression	6.73E+12	Akaike info criterion	62.14060
Sum squared resid	4.35E+27	Schwarz criterion	62.92682
Log likelihood	-4065.280	Hannan-Quinn criter.	62.46009
F-statistic	229.5468	Durbin-Watson stat	0.914539
Prob(F-statistic)	0.000000		

Estimasi regresi dengan model Fixed Effect yang diterapkan pada data panel 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai probabilitas sebesar 0,8400 yang jauh melampaui batas signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa variasi besaran

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

DAU yang diterima pemerintah daerah belum mampu menjelaskan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara meyakinkan. Secara statistik, hal ini berarti perubahan dalam nilai DAU tidak disertai dengan perubahan yang sistematis pada laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, sehingga kontribusi DAU terhadap peningkatan output riil daerah dapat dikatakan lemah selama periode observasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan DAU lebih berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal minimum antardaerah daripada pendorong langsung pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi substansi fiskal, hasil tersebut dapat dihubungkan dengan struktur penggunaan DAU pada level pemerintah daerah. Porsi terbesar DAU umumnya masih terserap untuk membiayai belanja operasional, terutama pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, pemeliharaan rutin, serta pengeluaran administratif lainnya, sehingga hanya menyisakan ruang yang relatif terbatas untuk belanja pembangunan dan investasi yang bersifat produktif. Ketika sebagian besar DAU diarahkan pada pengeluaran yang tidak secara langsung meningkatkan kapasitas produksi atau kualitas infrastruktur, wajar apabila dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak muncul secara signifikan dalam jangka pendek. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian Syamsudin (2019) yang mengkaji pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan karena lebih dominan digunakan untuk keperluan administratif daripada pembiayaan aktivitas ekonomi produktif. Hasil tersebut menguatkan pandangan bahwa dampak DAU sangat bergantung pada komposisi belanja yang dibiayai apabila porsi untuk belanja modal dan kegiatan strategis relatif kecil, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan terbatas.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, peran DAU di Sumatera Utara masih lebih tampak sebagai *equalization grant* yang menjamin keberlangsungan layanan publik dasar, bukan sebagai instrumen yang secara agresif mendorong ekspansi ekonomi. Meski demikian, potensi DAU untuk mendukung pertumbuhan tetap ada apabila pemerintah daerah mampu melakukan penataan ulang prioritas anggaran. Penguatan peran DAU dapat dilakukan melalui peningkatan proporsi belanja modal, pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, serta program pemberdayaan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas jangka panjang. Dalam konteks reformasi fiskal, pergeseran dari belanja rutin menuju belanja yang lebih produktif menjadi kunci agar DAU tidak sekadar menjaga fungsi pelayanan dasar, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil regresi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pola yang serupa. Secara parsial, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Nilai probabilitas sebesar 0,8362 yang jauh lebih besar daripada 0,05, baik pada output regresi maupun hasil uji t, mengindikasikan bahwa fluktuasi nilai DAK yang diterima kabupaten/kota belum mampu menjelaskan variasi pertumbuhan PDRB secara berarti selama periode penelitian. Dengan kata lain, meskipun DAK secara desain diarahkan untuk membiayai program-program prioritas nasional di daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, besarnya alokasi yang diterima belum cukup kuat tercermin dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahunan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Lulage et al. (2023), di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menemukan bahwa DAK tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menjelaskan bahwa desain dan realisasi program yang dibiayai DAK sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan standar layanan minimal dan pembangunan fasilitas dasar, sehingga dampaknya terhadap ekspansi output ekonomi baru terasa dalam jangka yang lebih panjang. Selain itu, berbagai kendala implementasi seperti keterlambatan penyaluran, kapasitas perencanaan yang terbatas, dan lemahnya integrasi antara proyek DAK dengan strategi pembangunan ekonomi lokal turut membatasi peran DAK sebagai pendorong langsung pertumbuhan. Pada Sumatera Utara, ketidaksignifikanan DAK mengisyaratkan bahwa meskipun dana tersebut telah disalurkan secara rutin, pemanfaatannya untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif misalnya melalui penguatan konektivitas antarwilayah, dukungan bagi sektor unggulan daerah, atau peningkatan kualitas tenaga kerja masih

belum optimal. Dampak yang bersifat lebih struktural dan jangka panjang ini kemungkinan belum sepenuhnya tercapture oleh periode pengamatan 2021–2024, sehingga efeknya terhadap pertumbuhan tahunan belum tampak secara statistik.

Berbeda dengan DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan pola hubungan yang lebih kuat dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil estimasi regresi memperlihatkan bahwa koefisien DBH bernilai positif dan signifikan, dengan t-statistic sebesar 2,888906 dan probabilitas 0,0048 yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05. Secara empiris, hal ini menegaskan bahwa peningkatan DBH yang diterima daerah berkorelasi dengan kenaikan PDRB, sehingga DBH dapat dipandang sebagai salah satu sumber pendanaan yang efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong aktivitas perekonomian lokal. Karena DBH bersifat lebih dekat dengan potensi ekonomi daerah misalnya dari pajak tertentu atau sumber daya alam tambahan penerimaan dari pos ini sering kali diikuti oleh perluasan kapasitas fiskal yang bisa diarahkan ke belanja modal dan investasi produktif.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai studi empiris yang menempatkan DBH sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. (Putri & Nuraini, 2023) menemukan bahwa DBH berkontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas fiskal yang kemudian diterjemahkan ke dalam peningkatan belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Pola yang sama terjadi di Sumatera Utara, di mana tambahan ruang fiskal dari DBH memungkinkan pemerintah daerah memperbesar alokasi anggaran pada proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap produktivitas, seperti pembangunan jalan, irigasi, fasilitas ekonomi, dan sarana pendukung sektor unggulan. Dari sudut pandang teori desentralisasi fiskal, hasil ini menguatkan argumen bahwa transfer yang lebih terkait dengan kinerja ekonomi daerah dan basis penerimaan (*by origin*) cenderung memberikan insentif lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonominya secara produktif. Dengan catatan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, DBH dapat menjadi katalis penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil.

Jika dilihat secara simultan, hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel transfer fiskal DAU, DAK, dan DBH bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Bukti empirisnya tampak dari nilai F-statistic sebesar 229,5468 dengan probabilitas 0,000000 yang jauh berada di bawah ambang signifikansi 0,05, sehingga secara kolektif kombinasi ketiga dana transfer tersebut diakui berperan penting dalam mendorong kinerja perekonomian daerah. Artinya, meskipun secara parsial DAU dan DAK tidak signifikan, keberadaan keduanya tetap menjadi bagian dari paket kebijakan fiskal yang, bersama dengan DBH, membentuk kerangka pembiayaan bagi kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Efek kumulatif dari ketiga komponen ini tampak memberikan dorongan substansial terhadap peningkatan PDRB, baik melalui mekanisme penyediaan layanan dasar, penguatan infrastruktur, maupun dukungan terhadap aktivitas ekonomi produktif.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,983887 menunjukkan bahwa sekitar 98,38% variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh perubahan DAU, DAK, dan DBH secara simultan, sedangkan sekitar 1,62% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi swasta, kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik, dan kondisi eksternal perekonomian. Besarnya nilai koefisien determinasi ini mengindikasikan bahwa spesifikasi model yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Utara selama periode penelitian. Dari sisi kebijakan, hasil ini menegaskan bahwa desain dan implementasi transfer fiskal dari pemerintah pusat memegang posisi strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, menggerakkan sektor-sektor produktif, serta meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, pola temuan ini menunjukkan bahwa bukan hanya besarnya dana transfer yang menentukan dampaknya terhadap pertumbuhan, tetapi juga struktur belanja, kualitas perencanaan, serta

kesesuaian pemanfaatan dana dengan potensi dan kebutuhan ekonomi lokal. DAU dan DAK akan sulit memberikan efek nyata bagi pertumbuhan apabila sebagian besar masih terserap pada belanja yang kurang produktif, sedangkan DBH dapat menjadi pengungkit penting ketika diarahkan ke investasi yang mendukung sektor unggulan dan konektivitas ekonomi wilayah. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas transfer fiskal ke depan tidak hanya perlu difokuskan pada besaran alokasi, tetapi juga pada reformulasi prioritas belanja dan penguatan tata kelola fiskal di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2024. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa kedua jenis transfer fiskal ini masih didominasi oleh pembiayaan belanja yang kurang produktif, sehingga belum mampu mendorong aktivitas perekonomian daerah secara nyata.

Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengandung arti bahwa peningkatan DBH cenderung diikuti oleh kenaikan PDRB melalui penguatan kinerja sektor-sektor ekonomi lokal. Ketika dilihat secara simultan, DAU, DAK, dan DBH bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan dana transfer, khususnya dengan mengalihkan pemanfaatannya ke pos-pos belanja yang lebih produktif agar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat dimaksimalkan.

REFERENSI

- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52(1), 93-108.
- Anggraeni, R. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-19.
- Antara, H., Alokasi, D., & Modal, B. (n.d.). *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*. 1–26.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (20, 1).
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries: Development from Below*. Edward Elgar Publishing.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-S125.
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance*. Cambridge University Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Elhsan, M., Ramli, M., & Sari, D. (2023). Efektivitas transfer fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 145-162.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, Y. S. (2021). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12, 79–92.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

439

Indexed



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku Saku Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2023. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Lulage, G., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 191–202.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Megasari, R., & Wahidahwati, W. (2022). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1-18.
- Muda, I., Marwan, & Siregar, N. (2022). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 45–58.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Nasution, A. P., & Siregar, H. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(3), 234-248.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. *JAAI*, 8(2), 101-118.
- Putri, N. R. N., & Nuraini, I. (2023). *Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi di Koridor Bali - Nusa Tenggara*. 7(02), 281–293.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Siswajanthi, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360-4369.
- Shah, A. (2007). *A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers*. World Bank.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, transfer daerah, dan belanja modal, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 155-170.
- Syahputra, R. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 48-58.
- Todoaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th Edition)*. Pearson Education Limited.